

Media Cetak	Ujungpandang Ekspres
Tanggal	Senin 30 Desember 2024
Wilayah	Kota Makassar



Pemkot Belum Terima Dana Bagi Hasil Rp270 Miliar

Pemkot Belum Terima Dana Bagi Hasil Rp270 Miliar

■ Dari Pemprov Sulsel

MAKASSAR, UPEKS—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar belum menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sekitar Rp270 miliar hingga saat ini.

DBH tersebut menjadi salah satu sektor pendapatan dari Pemkot Makassar. Sehingga, DBH yang belum terbayarkan menjadi piutang bagi Pemkot Makassar.

"Laporan Badan Keuangan, kita masih memiliki piutang kalau dihitung Rp30 miliar masih ada sembilan bulan jadi sekitar Rp270 miliar," kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Jumat (27/12/2024).

Ia menjelaskan, penerimaan DBH akan menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun ini. Dengan penerimaan DBH, maka PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa Rp1,7 triliun ditambah dengan berlakunya dana bagi hasil bisa langsung mencapai Rp2 triliun," kata Danny, sapaan Wali Kota Makassar.

Menurutnya, sekitar 7.000 tenaga Laskar Pelangi akan di evaluasi jika DBH tersebut tak dapat terealisasi. Pemkot melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program Laskar Pelangi, mengingat ketidakmampuan Pemkot untuk membayar insentif tersebut tanpa adanya kepastian pembayaran dari Pemprov Sulsel.

"Itu akan mengancam Laskar Pelangi kalau tidak ada kepastian pembayaran kami yang Rp250 miliar hingga Rp270 miliar itu," ujar Danny.

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar optimis mampu meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2 triliun. Optimisme tersebut berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peme-

rintah Daerah.

Kepala Bapenda Makassar, Firman Hamid Pagarra mengatakan, penerapan regulasi tersebut memberikan kewenangan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Tentu saja Insyaallah di akhir tahun 2025 dengan potensi yang ada di pajak kendaraan bermotor di angka Rp300 miliar sampai Rp400 miliar. Jadi apabila tahun ini kita capai Rp1,6 triliun, Insyaallah akhir 2025 sudah tercapai Rp2 triliun," kata Firman.

Keyakinan tersebut diperkuat dengan raihan PAD sebesar Rp1,3 triliun hingga awal Desember 2024. Realisasi PAD ini ditarget bisa mencapai Rp1,6 triliun hingga akhir tahun nanti.

Sehingga, target PAD Rp2 triliun pada 2024 dapat dipenuhi melalui penerimaan PKB dan BBNKB. Apalagi, estimasi potensi PKB dan BBNKB mencapai Rp300-400 miliar di Kota Makassar. (rul/hms)